|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Metro Sulawesi | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Sabtu, 8 November 2014 |
| Keterangan | : | Pengadaan Mobil dinas disorot karena tidak masuk anggaran 2014 |
| Entitas | : | Buol |

**Buol, Metrosulawesi.com -**Pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mendapat sorotan karena dinilai tidak masuk dalam struktur APBD tahun 2014.

Sorotan itu, diantaranya dilontarkan oleh mantan ketua Komisi III DPRD Buol periode 2009-2014, Baharudin Harun.

Menurutnya, selain Mobnas Wakil Bupati yang mendapat persetujuan DPRD tidak pernah ada pembahasan pengadaan Mobnas baik pada penetapan maupun perubahan ABPD 2014 karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

“Saya orang yang paling kaget, maka saya berani bilang pengadaan mobil Dikpora itu gunakan dana siluman karena setahu saya yang diakomodir itu cuma mobilnya wakil Bupati, itupun susah menyakinkan persidangan karena kondisi keuangan pas-pasan,” tegas Baharudin baru-baru ini.

Ditegaskan Baharudin, kegiatan yang mengambil dana dari pos lain dalam struktur APBD untuk kegiatan berbeda tanpa melalui perubahan sama halnya tidak merubah nomen klatur  dan merupakan sebuah pelanggaran.

“Karena tidak ada konfirmasi ke DPRD maka secara otomatis tidak beruba nomenklaturnya dan resikonya sangat fatal itu dia (Disdikpora), saya berani biar dibuka itu risalah dan rekaman sidang tidak ada itu pembelian mobil di Disdikpora,” tegas Baharudin.

Kepala Dinas Dikpora Buol Tonang Mallongi, kepada Metrosulawesi membantah bila pengadaan Mobnas tidak masuk dalam struktur APBD.

“Pembelian mobil dinas itu sudah ada dalam DPA kita, karena itu DPA dinas pendidikan perubahan itukan pasti melalui persetujuan DPR kemudian TAPD,”sebut Tonang, Sabtu (8/11/2014) di ruang kerjanya.

Diakuinya, apabila Disdikpora melakukan pembelian diluar struktur APBD secara otomatis kebijakan itu menyalahi  aturan terhadap pengelolaan keuangan taat asas yang berkonsekwensi hukum.

“Yang namanya seluruh kegiatan yang ada di Dinas pasti sudah melalui persetujuan  dan saya tidak berani melakukan belanja kalau belum ada persetujuan karena itu melanggar aturan dan pasti di penjara pak, jadi tidak ada itu belanja di luar struktur,” terang Tonang.